



Artikel Penelitian

Received: 2 November
2023
Revised: 10 November
2023
Accepted: 10 November
2023

Kata Kunci:
Perencanaan;
Pelaporan;
Evaluasi Dan Kinerja

Keywords:
Planning; Reporting;
Evaluation and Performance

INDEXED IN
SINTA - Science and
Technology Index
Crossref
Google Scholar
Garba Rujukan Digital: Garuda

**CORRESPONDING
AUTHOR**

Ng Syamsiah. B
Universitas Ichsan Gorontalo

EMAIL
Syamsiah2180@gmail.com

OPEN ACCESS
E ISSN 2623-2022

Pengaruh Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Anggaran terhadap Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato

The Influence of Budget Planning, Reporting and Evaluation on the Performance of the Pohuwato Regency Transportation Service

Ng Syamsiah. B
Universitas Ichsan Gorontalo

Abstrak: Tujuan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perencanaan, pelaporan dan evaluasi anggaran secara simultan terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato. Dari hasil olahan data, dengan menggunakan SPSS-16 dapat diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,098 lebih besar jika dibandingkan dengan nilai t_{tabel} sebesar 2,056. Yang berarti bahwa variabel Perencanaan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja (Y) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato. Demikian pula halnya diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,046 yang lebih besar dari taraf signifikan yang digunakan yaitu 0,05 atau 5% ($0,046 < 0,05$). nilai t_{hitung} sebesar 2,060 lebih besar jika dibandingkan dengan nilai t_{tabel} sebesar 2,056 dan didukung dengan nilai signifikan 0,05 atau 5%, yang berarti bahwa variabel pelaporan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja (Y) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato. Sedangkan variabel evaluasi diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,238 lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai t_{tabel} sebesar 2,056. Yang berarti bahwa variabel evaluasi (X3) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja (Y) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato. F_{hitung} sebesar 3,208 $>$ F_{tabel} sebesar 2,980 dengan probabilitas terjadinya kesalahan F_{hitung} lebih kecil dari taraf (α) kesalahan yang ditentukan $0,040 < 0,005$. Dengan demikian variabel perencanaan (X1), pelaporan (X2) dan evaluasi (X3) secara simultan berpengaruh terhadap terhadap kinerja (Y) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato.

Abstract: The aim of this research is to determine and analyze the influence of simultaneous budget planning, reporting and evaluation on the performance of the Pohuwato Regency Transportation Service. From the data processing results, using SPSS-16, a t count value of 2.098 can be obtained, which is greater than the t table value of 2.056. Which means that the Planning variable (X1) has a positive and significant effect on performance (Y) at the Pohuwato Regency Transportation Service. Likewise, a significance value of 0.046 was obtained, which was greater than the significance level used, namely 0.05 or 5% ($0.046 < 0.05$). The calculated t value of 2.060 is greater than the table value of 2.056 and is supported by a significant value of 0.05 or 5%, which means that the reporting variable (X2) has a positive and significant effect on performance (Y) at the Pohuwato Regency Transportation Service. Meanwhile, the evaluation variable obtained a t count value of 0.238, which is smaller than the table value of 2.056. Which means that the evaluation variable (X3) has a positive and insignificant effect on performance (Y) at the Pohuwato Regency Transportation Service. F count is 3.208 $>$ F table is 2.980 with the probability of an F count error occurring being smaller than the specified error level (α) of $0.040 < 0.005$. Thus, the variables planning (X1), reporting (X2) and evaluation (X3) simultaneously influence the performance (Y) of the Pohuwato Regency Transportation Service.

Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)

Doi: 10.56338/jks.v6i11.4313

Pages: 1459-1467

LATAR BELAKANG

Kinerja yang dicapai oleh suatu organisasi pada dasarnya adalah prestasi para anggota organisasi itu sendiri, mulai dari tingkat atas sampai pada tingkat bawah. Konsep kinerja pemerintah daerah sendiri muncul ketika institusi pemerintahan mulai mencoba mengenalkan konsep baru dalam pengelolaan urusan publik menjadi *good governance*. Organisasi yang berhasil merupakan organisasi yang memiliki visi dan misi yang jelas serta terukur. Artinya bahwa visi dan misi tidak akan bermakna ketika tidak teraktualisasikan dalam kinerja organisasi dalam kerangka menciptakan *good governance*.

Dalam upaya mencapai suatu kinerja organisasi dengan baik, maka diperlukannya suatu rencana kerja yang baik, terarah, dan komprehensif, sehingga mudah bagi manajemen untuk mengendalikan kegiatan operasional dari organisasi tersebut. Adapun yang dihasilkan tersebut disajikan dalam anggaran yang disusun oleh manajemen berdasarkan target yang disesuaikan dengan kondisi maupun kebutuhan organisasi, yang periodenya bersifat satu tahun, maupun periode yang bersifat lebih dari satu tahun, dan disusun dengan format tertentu.

Tahap penyusunan anggaran merupakan tahap yang sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja justru bisa mengagalkan program yang telah disusun sebelumnya. Sering dijumpai dalam praktek, penyusunan anggaran seolah-olah merupakan bagian yang terpisah dengan perumusan dan perencanaan strategik sehingga keberhasilan penerapan anggaran tidak sejalan dengan keberhasilan program dan tujuan organisasi. Penganggaran seperti ini tidak bisa menghasilkan anggaran yang efektif sebagai alat manajemen untuk menjembatani pencapaian tujuan organisasi.

Terkait proses pengelolaan anggaran oleh aparat pemerintah yang terbilang belum optimal sehingga berakibat pada kinerja organisasi, yang seharusnya mendapat perhatian dari pemerintah daerah dimana pemerintah daerah sebagai penerima wewenang dalam mengelola organisasi perlu melakukan pekerjaan dengan sebaik baiknya untuk mencapai tujuan organisasi dalam hal ini pencapaian kinerja organisasi yang baik. Artinya jika seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja yang baik pula bagi organisasinya maka ia akan mendapat hasil yang baik pula dari kerjanya dan akan memberikan keuntungan bagi organisasinya, ayat tersebut secara tidak langsung menjelaskan tentang pentingnya meningkatkan kinerja dalam segala hal. Hal ini seharusnya menjadi landasan bagi pemerintah agar bersungguh sungguh dalam melakukan pekerjaannya sebagai aparat pemerintah yang bertanggung jawab terhadap kinerja organisasi yang menaunginya. Agar tidak terjadi permasalahan permasalahan dalam menjalankan kewajibannya khususnya yang terkait dengan permasalahan anggaran.

Permasalahan penganggaran yang selama ini terjadi di setiap daerah, dalam proses penyusunan, pembahasan sampai pada penetapan anggaran yang termuat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang disusun berdasarkan kumpulan RKA SKPD, umumnya perhatian DPRD lebih terfokus pada besarnya anggaran. Penentuan anggaran secara incremental, penentuan anggaran dipengaruhi oleh nama kegiatan, penentuan anggaran dipengaruhi oleh siapa yang mengajukan anggaran. Fenomena ini merupakan bentuk dari lemahnya perencanaan anggaran pada pemerintah daerah.

Tak terlepas dari permasalahan anggaran, kinerja organisasi pada instansi di daerah pada umumnya terbilang belum optimal hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021, audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahwa Laporan keuangan Tahun anggaran 2021 mendapat opini wajar dengan pengecualian. Selain itu, pengelolaan keuangan pada bendahara umum daerah tidak tertib dan Laporan Keuangan Tahun 2021 tidak berdasarkan laporan konsolidasian, penyusunan anggaran belanja daerah tidak tertib.

Melihat dari permasalahan diatas berupa alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan yang semestinya, memerlukan perencanaan anggaran yang baik selain itu, menghindarkan terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) alokasi belanja, maka menyusun setiap kegiatan secara logis dan menyusun anggaran yang berdasarkan kinerja yang jelas dan terukur menjadi penting. Salah satu upaya

untuk mencapai hal tersebut adalah pelaporan dan evaluasi kinerja perlu dilakukan untuk maksud mencari kemungkinan terjadinya suatu penyimpangan dalam anggaran tersebut.

Evaluasi anggaran pada dasarnya adalah proses membandingkan antara anggaran yang disusun dengan pelaksanaannya, sehingga dari perbandingan ini dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk mengukur efisiensi serta penilaian terhadap kinerja. Sehingga dalam penelitian ini perencanaan anggaran dan pelaporan serta evaluasi anggaran dikaitkan untuk melihat hubungannya dengan peningkatan kinerja instansi terkait.

Penilaian kinerja dilakukan dengan menganalisis simpangan kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Penyerapan anggaran, khususnya belanja barang dan jasa, memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu setiap instansi pemerintah harus mengatur pengeluarannya agar berjalan lancar dan dapat mendukung keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Namun demikian penyerapan anggaran tidak diharuskan mencapai 100%, tetapi penyerapan anggaran diharapkan mampu memenuhi setidaknya lebih dari 80% anggaran yang telah ditetapkan. Tinggi rendahnya penyerapan anggaran dalam suatu SKPD menjadi tolak ukur kinerja dari SKPD tersebut.

Penyerapan anggaran memiliki arti penting dalam pencapaian tujuan nasional, yaitu peningkatan dan pemeliharaan kesejahteraan rakyat. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa fungsi anggaran sebagai instrumen kebijakan ekonomi, berperan untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Tindak lanjut dari anggaran adalah penyerapan anggaran yang telah dibuat lalu mengalokasikan nya sesuai dengan apa yang ada di Anggaran Penerimaan Belanja Daerah.

Dalam hal ini, yang ditindaklanjuti adalah penyerapan terhadap kegiatan yang sudah direncanakan untuk dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Dengan demikian, yang dimaksudkan dengan penyerapan anggaran adalah menindaklanjuti dari rencana anggaran sesuai dengan alokasi dana yang telah tertuang di dalam APBN atau APBD.

Rendahnya tingkat penyerapan anggaran akan berpengaruh kepada perekonomian nasional secara keseluruhan, antara lain efektivitas alokasi belanja yang ditujukan untuk pembangunan negara menjadi tidak tepat sasaran, berdasarkan indikator keberhasilan anggaran yang telah ditetapkan. Penyerapan anggaran yang lambat telah menjadi permasalahan sebagian besar satuan kerja K/L setiap tahun anggaran, sehingga keberhasilan pelaksanaan PBK (Penganggaran Berbasis Kinerja) masih menjadi isu yang dipertanyakan oleh berbagai kalangan.

Kegagalan target penyerapan anggaran memang akan berakibat hilangnya manfaat belanja. Karena dana yang telah dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan yang berarti terjadi *idle money*. Apabila pengalokasian anggaran efisien, maka keterbatasan sumber dana yang dimiliki negara dapat dioptimalkan untuk mendanai kegiatan strategis. Permasalahan rendahnya penyerapan anggaran serta kualitas penyerapan anggaran ini antara lain disebabkan oleh lemahnya perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja (Satker). Satker kurang siap dalam menyusun rencana anggaran, yang akan berdampak pada kualitas dokumen anggaran (DPA), dan dalam pelaksanaan anggarannya memerlukan waktu untuk melakukan penyesuaian, termasuk revisi DPA.

Laporan Realisasi Anggaran sebagai salah satu dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan gambaran bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mengelola dana publik. Dalam Laporan Realisasi Anggaran ini, akan terlihat seberapa besar pencapaian pemerintah dalam melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan, baik dari segi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Dengan demikian, laporan ini juga akan menggambarkan perbedaan antara realisasi atau pencapaian dengan anggaran yang telah ditetapkan. Perbedaan tersebut akan terakumulasi dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau disebut SiLPA.

PP No.58 Tahun 2005 menjelaskan bahwa SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Sisa lebih perhitungan anggaran atau SiLPA terjadi hampir di setiap pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Sisa anggaran pada akhir tahun

anggaran (SILPA) yang akan menjadi penerimaan pada awal tahun anggaran berikutnya (SiLPA) merupakan indikator dalam menilai kualitas penganggaran pada pemerintah daerah.

Sisa anggaran mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggarannya serta keakuratan estimasi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang ditetapkan sebelum pelaksanaan anggaran. Sisa anggaran yang besar menunjukkan rendahnya daya serap anggaran untuk belanja dan atau tingginya kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatannya di atas target yang telah ditetapkan. Namun, sisa anggaran juga mengindikasikan “pemborosan” karena adanya dana “menggungur” yang tidak teralokasikan secara efektif selama tahun anggaran berjalan.

Dalam praktiknya, akan sulit untuk mencapai realisasi anggaran belanja seratus persen. Seluruh pemerintah daerah di Indonesia selalu melaporkan adanya sisa anggaran atau anggaran tidak terserap seratus persen pada akhir tahun. Sisa anggaran yang besar mencerminkan daya serap anggaran yang rendah. Para ekonom memandang rendahnya tingkat serapan anggaran sebagai salah satu indikator kegagalan birokrasi yang dapat menghambat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Rasio realisasi penyerapan belanja kementerian atau lembaga terhadap pagu anggaran belanja merupakan suatu bentuk indikator efektifitas belanja negara. Efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna), efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.

Dalam organisasi sektor publik, setelah adanya operasional anggaran, langkah selanjutnya adalah pengukuran kinerja untuk menilai prestasi dan akuntabilitas organisasi dan manajemen dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas yang merupakan salah satu ciri dari terapan good governance bukan hanya sekedar kemampuan menunjukan bagaimana menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien.

Ekonomis terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Efisiensi merupakan perbandingan output/ input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Sedangkan efektif merupakan tingkat standar kinerja atau program dengan target yang telah ditetapkan yang merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang teruang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

Sebagai perwujudan atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dan Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Cara Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Mengingat sistem yang diterapkan selama ini belum dapat menjembatani penyusunan laporan keuangan, maka dilakukan pendekatan praktis yaitu mengumpulkan, menganalisa, mencatat anggaran dan realisasi serta data lainnya ke dalam pos-pos neraca dan laporan realisasi anggaran. Dalam penyusunan laporan keuangan ini belum seluruhnya berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.

Kinerja keuangan pemerintah dinilai apabila alokasi dari realisasi anggaran terlaksana dengan baik. Realisasi anggaran terdiri dari pendapatan dan belanja. Pendapatan adalah semua penerimaan kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintahan dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada kas umum daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak dicatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran.

Belanja adalah semua pengeluaran kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari kas umum daerah kecuali uang persediaan. Khusus pengeluaran dari uang persediaan melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat dipertanggungjawabkan atas pengeluaran tersebut dan disahkan oleh pengguna anggaran. Belanja

dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana kerja anggaran. Belanja Dinas Pendidikan meliputi belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang, serta belanja modal yang terdiri dari belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, serta belanja aset tetap lainnya.

Instansi pemerintah yang berkewajiban menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan menyampaikan pelaporannya adalah instansi dari pusat, Pemerintah Daerah kabupaten/Kota. Adapun penanggung jawab penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab melayani fungsi administrasi di instansi masing. Selanjutnya pimpinan bersama tim kerja harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan/kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Selain itu, penyusunan LAKIP harus mengikuti prinsip-prinsip yang lazim, yaitu laporan harus disusun secara, objektif, dan transparan. Disamping itu, perlu diperhatikan prinsip-prinsip lain: 1) Prinsip pertanggungjawaban (adanya *responsibility center*), sehingga lingkungannya jelas. Hal-hal yang dikendalikan (*controllable*) oleh pihak yang melaporkan harus dapat dimengerti pembaca laporan. 2) Prinsip pengecualian, yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambil keputusan dan pertanggung jawaban instansi yang bersangkutan. Misalnya, hal-hal yang menonjol baik keberhasilan maupun kegagalan, perbedaan antara realisasi dengan target/standar/budget, penyimpangan dari skema karena alasan tertentu dan sebagainya. 3) Prinsip manfaat, yaitu manfaat laporan harus lebih besar dari pada biaya penyusunan. Isi dari LAKIP adalah uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya yang menjadi perhatian utama instansi pemerintah.

Selain itu perlu dimasukkan juga beberapa aspek pendukung meliputi uraian pertanggungjawaban mengenai: 1) Aspek keuangan, 2) Aspek sumber daya, 3) Aspek sarana dan prasarana dan 4) Metode kerja, pengendalian manajemen, dan kebijaksanaan lain yang mendukung pelaksanaan tugas instansi.

Agar LAKIP dapat lebih berguna sebagai umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka bentuk dan isinya diseragamkan tanpa mengabaikan keunikan masing-masing instansi pemerintah. Penyeragaman ini paling tidak dapat mengurangi perbedaan cara penyajian yang cenderung menjauhkan pemenuhan persyaratan minimal akan informasi yang seharusnya dimuat dalam LAKIP. Penyeragaman juga dimaksudkan untuk pelaporan yang bersifat rutin, sehingga perbandingan atau evaluasi dapat dilakukan secara memadai. LAKIP dapat dimasukkan pada kategori laporan rutin, Karena paling tidak disusun dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan setahun sekali. Dan juga agar pengungkapan akuntabilitas aspek-aspek pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tidak tumpang tindih dengan pengungkapan akuntabilitas kinerja, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Uraian pertanggungjawaban keuangan dititik beratkan pada perolehan dan penggunaan dana, baik dana yang berasal dari dana alokasi APBD (rutin maupun pembangunan) maupun dana yang berasal dari PNB (penerimaan Negara bukan pajak).

Uraian pertanggungjawaban sumber daya manusia, dititik beratkan pada penggunaan dan pembinaan dalam hubungannya dengan peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil atau manfaat, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Uraian mengenai pertanggungjawaban penggunaan sarana dan prasarana dititik beratkan pada pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangannya.

Uraian tentang metode kerja, pengendalian manajemen dan kebijaksanaan lainnya, difokuskan pada manfaat atau dampak dari suatu kebijaksanaan yang merupakan cerminan pertanggungjawaban kebijaksanaan (*policy accountability*).

METODE

Metode penelitian ini adalah deskriptif yaitu dengan menggunakan statistika untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini

menggunakan analisis data deskriptif kuantitatif yang memberikan gambaran dengan menganalisis data penelitian berupa angka dan tabel yang berfungsi sebagai penjelasan hasil penelitian.

HASIL DAN DISKUSI

Penelitian ini menggunakan uji analisis regresi berganda untuk memprediksi apakah perencanaan (X_1), pelaporan (X_2) dan evaluasi (X_3) berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kinerja (Y) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato. Analisis ini menggunakan data berdasarkan Kuisisioner yang dibagikan. Perhitungan uji ini dilakukan dengan bantuan SPSS-16. Adapun hasil dari perhitungan analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Analisis Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	11.788	12.392	
	Perencanaan	.600	.286	.353
	Pelaporan	.750	.364	.349
	Evaluasi	.104	.436	.040

a. Dependent Variable: Kinerja

Sumber: Olahan Data SPSS-16 tahun 2023

Dari hasil olahan data SPSS maka diperoleh persamaan regresi berganda berikut:

$$Y = 11,788 + 0,600X_1 + 0,750X_2 + 0,104X_3$$

Berdasarkan hasil perhitungan regresi berganda diatas, maka dapat di ketahui bahwa angka konstanta sebesar 11,788 yang artinya bahwa angka kinerja (Y) sebesar 11,788 apa bila jika variable yang lain bernilai 0. Koefisien regresi perencanaan (b_1) sebesar 0,600 yang artinya bahwa setiap perubahan variable perencanaan (b_1) akan diikuti oleh perubahan kinerja (Y) sebesar 0,600 dengan asumsi variable lain adalah konstan. Koefisien regresi pelaporan (b_2) sebesar 0,750 yang artinya bahwa setiap perubahan variable pelaporan (b_2) akan diikuti oleh perubahan kinerja (Y) sebesar 0,750 dengan asumsi variable lain adalah konstan. Koefisien regresi evaluasi (b_3) sebesar 0,104 yang artinya bahwa setiap perubahan variable evaluasi (b_3) akan diikuti oleh perubahan kinerja (Y) sebesar 0,104 dengan asumsi variable lain adalah konstan. Sedangkan untuk melihat variasi naik turunnya variable kinerja (Y) dapat diketahui pada table koefisien determinasi (R^2) berikut:

Tabel 2. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.520 ^a	.270	.186	3.155

a. Predictors: (Constant), Evaluasi, Perencanaan, Pelaporan

Sumber: Olahan Data SPSS-16 tahun 2023

Berdasarkan pada tabel Model Summary diatas, maka dapat diketahui nilai koefisien determinasi (R^2) adalah 0,270 atau 27%, yang berarti bahwa 27% variasi naik turunnya variabel kinerja (Y) mampu dijelaskan oleh variabel perencanaan (X_1), pelaporan (X_2) dan evaluasi (X_3), namun sisanya sebesar 73% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Secara parsial, variabel perencanaan (X_1), pelaporan (X_2) dan evaluasi (X_3) terhadap kinerja (Y) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato menggunakan uji t, jika dibandingkan nilai t_{tabel} dengan nilai t_{hitung} pada taraf signifikan 0,05 dengan nilai df sebesar $n - k - 1 = 30 - 3 - 1 = 26$, maka diperoleh df sebesar 26 dan untuk nilai t_{tabel} sebesar 2,056. Selain itu, uji signifikan dapat dilihat dari nilai signifikansi koefisien regresi. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikan yang digunakan (5% atau 0,005) maka hipotesis penelitian tersebut dapat diterima, dan jika sebaliknya nilai signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,005 maka hipotesis ditolak.

Adapun hasil perhitungan regresi berganda untuk uji t atau uji parsial berdasarkan table berikut adalah:

Tabel 3. Uji Parsial (Uji t)

Model	t	Sig.
(Constant)	.951	.350
Perencanaan	2.098	.046
Pelaporan	2.060	.050
Evaluasi	.238	.814

a. Dependent Variable: Kinerja

Sumber: Olahan Data SPSS16 tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas maka diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,098 lebih besar jika dibandingkan dengan nilai t_{tabel} sebesar 2,056. Yang berarti bahwa variabel Perencanaan (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja (Y) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato. Demikian pula halnya diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,046 yang lebih besar dari taraf signifikan yang digunakan yaitu 0,05 atau 5% ($0,046 < 0,05$).

Berdasarkan tabel di atas maka diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,060 lebih besar jika dibandingkan dengan nilai t_{tabel} sebesar 2,056 dan didukung dengan nilai signifikan 0,05 atau 5%, yang berarti bahwa variabel pelaporan (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja (Y) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato.

Berdasarkan tabel di atas maka diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,238 lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai t_{tabel} sebesar 2,056. Yang berarti bahwa variabel evaluasi (X_3) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja (Y) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato.

Uji simultan atau uji F dilakukan dalam penelitian ini dengan maksud untuk melihat pengaruh variabel perencanaan (X_1), pelaporan (X_2) dan evaluasi (X_3) terhadap kinerja (Y) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato dengan menggunakan 30 responden sekaligus sebagai sampel. Dalam penelitian ini menggunakan nilai signifikansi dengan taraf $\alpha = 5\%$.

Tabel 4. Uji F
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	95.818	3	31.939	3.208	.040 ^a
	Residual	258.882	26	9.957		
	Total	354.700	29			

a. Predictors: (Constant), Evaluasi, Perencanaan, Pelaporan

b. Dependent Variable: Kinerja

Sumber: Olahan Data SPSS16 tahun 2023

Hasil olahan data dengan menggunakan SPSS dapat diperoleh F_{hitung} sebesar 3,208 $>$ F_{tabel} sebesar 2,980 dengan probabilitas terjadinya kesalahan F_{hitung} lebih kecil dari taraf (α) kesalahan yang ditentukan

0,040 < 0,005. Dengan demikian variabel perencanaan (X1), pelaporan (X2) dan evaluasi (X3) secara simultan berpengaruh terhadap terhadap kinerja (Y) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perencanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato. Pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato. Evaluasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato. Perencanaan, pelaporan dan evaluasi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato.

REKOMENDASI

Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato hendaknya mempertahankan mempertahankan aspek perencanaan dan pelaporan anggaran yang dapat memberi manfaat bagi instansinya dalam melakukan perencanaan dan pelaporan anggaran sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan kinerja. Dalam hal aspek evaluasi kinerja anggaran masi perlu perhatian dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato ademi tercapainya peningkatan akuntabilitas kinerja instansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R.S. 2013. Inovasi Pembelajaran. Cetakan.I. Jakarta: Bumi Aksara
- Abdul, Latif. 2014. Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi. Prenada Media Group. Jakarta.
- Agustina, Asri,2009. "Pengaruh Tingkat Kepatuhan WajibPajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama" SNA. Palembang, Tidak dipublikasikan
- Sasongko(2010), Anggaran. Salemba empat, Jakarta.
- Geg Edi Prasetyo. 2010. Peyusunan dan Analisis Laporan Kauangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Andi Publisher
- Ghozali. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program I B M S P S S.
- Eko Haryanto dkk. 2007. Sawi & Selada. Penerbit penebar swadaya,Wisma Hijau. Jl Raya Bogor KM 30. Mekar Sari Cimanggis. Depok 16952.
- Kuncoro, Mudrajat, 2013. Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi Edisi 3,(Jakarta: Penerbit Erlangga)
- Kumorotomo, Wahyu. 2005. Akuntabilitas dalam teori dan praktek. Yogyakarta: MAP UGM dan Pustaka Pelajar.
- Kurniawan, A. W. 2012. Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Harga Pokok Penjualan HPP Dengan Metode Average', Techno.com, 11,pp.12
- Kusuma, Arta Adi. 2013. Pengaruh Motivasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Hotel Muria semarang. Skripsi UNES. Semarang
- L. Mathis, Robert & H Jackson. 2013. Human Resource Management (edisi 10). Jakarta : Salemba Empat.
- Luky Lrestiwawan. 2015. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada SKPD Kab. Ponorogo). Unismuh Ponorogo.
- Mahmudin, Ali. 2010. Mengukur Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis. Makalah Konfrensi Nasional Matematika XV. UNIMA Manado 30 Juni-3 Juli 2010. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik : Cetakan Pertama. Yogyakarta : Penerbit BPFE-Yogyakarta.

- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Putri, 2014. Hubungan Efikasi Diri Dan Kecerdasan Emosional Dengan Prestasi Belajar Mata Kuliah Statistika Ekonomi Mahasiswa Angkt 2013 Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Medan T.A. 2013/2014.
- Rajindra, Burhanuddin, Rasmi Nur Anggaraeni, Nasrulhak Akkas, and Ahmad Yani. 2020. "Effect of Funding Policy and Working Capital on Financial Performance." *Journal of Engineering and Applied Sciences* 15(3): 847–50.
- Rajindra, Rajindra. 2021. "Strategi Manajemen Pengelolaan Alat Kontrasepsi Di Kabupaten Donggala, Indonesia." *Jurnal Sinar Manajemen* 8(1): 14–22.
- Rajindra, Rajindra, Mohamad Andri, and Ahmad Yani. 2020. "Quality of Health Services in the Family Planning Program in Donggala Regency, Indonesia." *Systematic Reviews in Pharmacy* 11(11).
- Rajindra, Rajindra, and Rasmi Nur Anggraeni. 2019. "Costly Fees, Men's Participation in Family Planning Declines." *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)* 1(1): 5–8.
- Rajindra, Rajindra, Guasmin Guasmin, and Burhanuddin Burhanuddin. 2020. "Financial Performance Analysis of Shares Returns in Cosmetics and Household Purposes Companies (Studies on Companies Listed on the Indonesian Stock Exchange)." *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)* 2(4): 196–204.
- RAJINDRA, Rajindra, Guasmin GUASMIN, Burhanuddin BURHANUDDIN, and Rasmi Nur ANGGRAENI. 2021. "Costs and Operational Revenue, Loan to Deposit Ratio Against Return on Assets: A Case Study in Indonesia." *The Journal of Asian Finance, Economics and Business* 8(5): 109–15.
- Republik Indonesia. 2000. Peraturan Pemerintah No.108 Tahun 2000 tentang TataCara Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Jakarta : Legalitas.
- Salbiah, Ridha Rizky. 2012. Pengaruh Evaluasi Anggaran terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (S K P D) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal. Universitas Sumatera Utara*. Vol 15, No 2.
- Sriharioto. 2012. Good Governance, Kompetensi KPPN & Persepsi Keberhasilan Pelaksanaan Penganggaran Berbasis Kinerja Kementerian/Lembaga. Tesis. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sugiyono. 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Bandung : Alfabeta.